

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN LURAH MANGKUBUMEN NOMOR 148.16/689.1  
TAHUN 2018 TENTANG KELOMPOK SENI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KELURAHAN MANGKUBUMEN (MPOK SINAH KLAMBEN)**

**Putut Kristiawan<sup>1)</sup>, Joko Pramono<sup>2)</sup>, Aris Tri Haryanto<sup>3)</sup>**  
E-mail : [kristiawanputut@gmail.com](mailto:kristiawanputut@gmail.com)  
Program Studi Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

**ABSTRAK**

*Kebijakan Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi beban hutang pelaku UMKM Mpok Sinah Klamben yang terjerat rentenir di Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Permasalahan yang sering terkait dengan Implementasi Keputusan Lurah Mangkubumen tentang Kelompok Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben). Implementasi Mpok Sinah Klamben merupakan salah satu langkah pembangunan yang dapat diartikan sebagai sebuah proses mendayagunakan masyarakat melalui keahlian dan potensi yang dimilikinya, dengan harapan masyarakat dapat mengembangkan diri secara lebih mandiri. Kelurahan Mangkubumen merupakan salah satu kelurahan yang berusaha memberdayakan masyarakat, salah satunya melalui Program Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben). Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Keputusan Lurah Mangkubumen tentang Kelompok Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben) di Kelurahan Mangkubumen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data atau sumber, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk mendeskripsikan penelitian mengenai menganalisis Implementasi Keputusan Lurah Mangkubumen tentang Kelompok Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben) di Kelurahan Mangkubumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menganalisis Implementasi Keputusan Lurah Mangkubumen tentang Kelompok Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben) di Kelurahan Mangkubumen dapat diambil dari berbagai aspek, termasuk dampaknya pada kesejahteraan pelaku UMKM, efektivitas pelaksanaan, dan dukungan dari masyarakat. Implementasi Masyarakat Melalui Program Mpok Sinah Klamben telah dilakukan melalui tiga tahap implementasi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran telah dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Sebagian besar masyarakat mendukung adanya program ini, namun terdapat juga beberapa yang kurang mendukung. Tahap pengkapasitasan telah dilakukan melalui pembentukan Pengurus Mpok Sinah Klamben, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan, serta membuat aturan main diantara mereka. Tahap pendayaan telah dilakukan melalui pemberian fasilitas pendukung, meningkatkan promosi melalui media sosial, dan mengikutsertakan Mpok Sinah Klamben dalam event-event.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, UMKM, Mpok Sinah Klamben, Mangkubumen*

## **ABSTRACT**

*It is hoped that the Mpok Sinah Klamben policy in Mangkubumen Village, Banjarsari District, Surakarta City can slightly reduce the debt burden of Mpok Sinah Klamben UMKM who are trapped by loan sharks in Mangkubumen Village, Banjarsari District, Surakarta City. Problems that are often related to the implementation of the Mangkubumen Village Head's decision regarding the Mangkubumen Village Small and Medium Enterprise Group (Mpok Sinah Klamben). The implementation of Mpok Sinah Klamben is one of the development steps which can be interpreted as a process of empowering the community through the skills and potential they possess, with the hope that the community can develop themselves more independently. Mangkubumen Village is one of the sub-districts that tries to empower the community, one of which is through the Mangkubumen Village Arts and Small and Medium Enterprises Group Program (Mpok Sinah Klamben). The metode of the research is to analyze the implementation of the Mangkubumen Village Head's decision regarding the Mangkubumen Village Small and Medium Business Group (Mpok Sinah Klamben) in Mangkubumen Village. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Informants in this research were selected purposively. The validity of the data used is data or source triangulation techniques, while the data analysis technique used is the implementation of model analysis from Daniel Mazmanian and Paul Sabatier. The unit of analysis in this research is the organization. The determination of this unit of analysis is based on objective considerations, to describe research regarding analyzing the implementation of the Mangkubumen Village Head's Decision regarding the Mangkubumen Village Small and Medium Enterprise Group (Mpok Sinah Klamben) in Mangkubumen Village. The results of the research show that analyzing the implementation of the Mangkubumen Village Head's decision regarding the Mangkubumen Village Small and Medium Enterprise Group (Mpok Sinah Klamben) in Mangkubumen Village can be taken from various aspects, including the impact on the welfare of UMKM actors, the effectiveness of implementation, and support from the community. Community Empowerment through the Mpok Sinah Klamben Program is carried out through three stages of empowerment, namely awareness, capacity building and empowerment. The awareness stage has been carried out through outreach to the entire community. Most people support this program, but there are also those who do not support it. The capacity building stage has been carried out through the formation of Mpok Sinah Klamben Management, providing technical guidance and training, as well as making main rules among them. The empowerment stage has been carried out through providing supporting assistance, increasing promotion through social media, and involving Mpok Sinah Klamben in events. events.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, UMKM, Mpok Sinah Klamben, Mangkubumen*

## PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro diartikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Secara umum, UMKM dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional (Tambunan, 2009:16).

Di era perdagangan bebas saat ini, peranan usaha kecil masyarakat sangat penting. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan

pekerjaan. Sebagian besar ahli ekonomi juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya ditentukan oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM juga dipercaya mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, lebih dari 99% dari unit bisnis di Indonesia adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Indonesia memiliki jumlah usaha besar sekitar 32.193 unit (0,01%), usaha menengah sekitar 334.066 unit (0,08%), usaha kecil sebesar 520.220 unit (1,01%), dan usaha mikro sebesar 63.113.521 unit (98,90%). Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan landasan perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan penggerak penting bagi perkembangan ekonomi lokal dan komunitas.

Selain itu, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 65,5 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 68.459.969 unit usaha mikro, 602.195 unit usaha kecil dan 444.280 unit usaha

menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2023 adalah sekitar 99,99% dari jumlah total unit usaha yang ada. Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 98,24%.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan perannya tersebut sangat penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sangat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Namun disisi lain, dalam mengembangkan usahanya, UMKM seringkali dihadapkan pada beberapa permasalahan. Diantaranya faktor SDM yang rendah, terbatasnya sarana dan prasarana, teknologi produksi, serta faktor kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Pelaku UMKM yang tidak banyak memiliki akses dan modal kerja akan sulit untuk menjalankan kegiatan produksinya. Tanpa modal kerja yang cukup pelaku usaha mikro ini akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

produk yang dihasilkan. Sumber keuangan yang digunakan oleh pelaku UMKM ini pada umumnya adalah jasa para pelepas uang atau lebih sering disebut rentenir. Mereka memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan memberatkan pengusaha mikro tersebut. Pelaku UMKM cenderung menggunakan jasa para pelepas uang (rentenir) karena beberapa faktor. Di antaranya adalah karena prosedur peminjaman yang mudah dan sederhana, sering kali tidak menggunakan agunan, dan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha itu sendiri.

Alasan lain mengapa banyak pelaku UMKM terjerembab praktek rentenir adalah karena: (1) memerlukan pinjaman yang sangat cepat dan tidak mengenal waktu; (2) tidak mampu menghitung antara beban (bunga dan denda) yang mesti dibayarnya dengan tingkat margin usaha; (3) rentenir mampu memberikan pelayanan sangat humanis dan sesuai dengan selera masyarakat; dan (4) tidak banyak lembaga keuangan (bank dan non-bank) yang mampu menjangkau golongan orang kecil dengan model yang mirip rentenir.

Di sisi lain, selama ini program bantuan yang digulirkan Pemerintah seringkali tidak efektif meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Program-program Pemerintah cenderung bersifat karitatif dan top down. Akibatnya,

segala program yang ada tidak mampu menumbuhkan semangat berusaha dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Faktanya, semua bantuan yang diberikan Pemerintah tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan jangka panjang, tetapi lebih pada kebutuhan konsumtif dan pragmatis. Kalaupun ada, itu hanya sedikit meningkatkan kesejahteraan khususnya para pelaku usaha mikro. Akibatnya, para pelaku UMKM tidak bisa mengembangkan usahanya karena perputaran uang usaha berputar pada hal-hal yang sifatnya konsumtif. Sehingga kemungkinan para pelaku UMKM yang sudah mulai sejahtera akan kembali masuk dalam jerat kemiskinan lagi. Selanjutnya, untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kebutuhan hidup, mereka kembali terjatuh kepada praktek rentenir.

Ketika para pelaku usaha kecil ini terjatuh kepada praktek rentenir yang sifatnya sangat eksploitatif, maka dampak secara ekonomi adalah: (1) kredit dari rentenir ini akan mengurangi produksi usaha di masa yang akan datang; (2) praktek rentenir berdampak pada terhambatnya proses pemerataan distribusi pendapatan masyarakat; dan (3) ketika proses pelunasan hutang, kesulitan para pelaku UMKM akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi, dan

berdampak pada gairah produksi dan usaha bisnis.

Berdasarkan hal tersebut maka isu utama pendampingan ini adalah bagaimana upaya untuk membebaskan diri para pelaku usaha kecil dari praktek kredit rentenir. Masyarakat pelaku UMKM yang selama ini mulai merintis usaha kecil-kecilan, perlu pendampingan pengelolaan keuangan, supaya usahanya bisa terus jalan. Uang hasil usaha bisa di kelola untuk pengembangan usaha dan untuk mempersiapkan kebutuhan keluarga yang lain. Pendampingan ini harus dilakukan secara simultan mulai dari pengetahuan terhadap manajemen keuangan, sampai pengelolaan dan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Lurah sebagai kepala kelurahan mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketertiban umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kelurahan dapat membentuk lembaga kemasyarakatan untuk membantu

tugas lurah. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas untuk membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan memiliki kegiatan yang meliputi peningkatan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai kondisi masyarakat setempat.

Dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, hal penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah kelurahan adalah memberdayakan masyarakat dengan sistem perekonomian secara maksimal. Hal tersebut diwujudkan dalam perwujudan ekonomi kerakyatan yang dimanifestasikan melalui Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam sistem perekonomian yang baik, masyarakat akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, kualitas dan kreativitas sumber daya manusia akan meningkat yang berujung dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai salah satu pemerintah kelurahan yang memiliki peran dalam melaksanakan

pemberdayaan masyarakat, khususnya UMKM. Pada tahun 2019, Kelurahan Mangkubumen ditetapkan menjadi kelurahan terbaik di Indonesia dalam bidang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Kompetisi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dalam acara Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2019 (Isnanto, 2019). Kompetisi tersebut dilandasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk mengukur efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, serta daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu yang menjadi program yang menjadi unggulan dalam penilaiannya adalah Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben).

Menurut pernyataan Lurah Mangkubumen, Dyah Yunita, S.STP., MM., kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan menjadi kompetisi paling bergengsi untuk tingkat kelurahan

terlebih sebagai capaian indikator keberhasilan pembangunan. Lurah Mangkubumen lebih berfokus pada permasalahan dasar yang sedang terjadi di wilayahnya dan menyediakan solusi pemecahannya. Lurah Mangkubumen berusaha mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di Mangkubumen yang meliputi permasalahan pedagang kaki lima, tempat publik yang terbatas, dan banyaknya UMKM yang terjerat rentan. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, Lurah Mangkubumen berupaya mengintegrasikan dengan segala potensi yang dimiliki untuk memberikan solusi penyelesaiannya, misalnya dengan memberdayakan pedagang kaki lima, UMKM, penggiat seni, Sasana Krida Warga, dan lain-lain. Menurut pengakuan Lurah Mangkubumen, inovasi program sebagai solusi pemecahan masalah tidak semata-mata bertujuan untuk mengikuti kompetisi, melainkan karena permasalahan tersebut benar-benar terjadi dan diperlukan adanya solusi pemecahan yang efektif.

Peranan pemerintah kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting untuk kelancaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat,

Kelurahan Mangkubumen membuat tiga program unggulan. Tiga program tersebut meliputi Kelompok Seni dan Usaha Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben), Mangkubumen Lawan Rentenir (Mangku Lawren), dan Mangkubumen Dolanan Bocah (Mangku Dolah). Mpok Sinah Klamben menjadi program kelurahan untuk menopang pengembangan ekonomi warga, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Mangkubumen. Mpok Sinah Klamben memiliki anggota yang terdiri dari pengusaha catering, makanan, dan musik dengan agenda setiap harinya diadakan acara bazar di Sasana Krida Warga Kelurahan Mangkubumen. (SinarHarapan.Net, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013). Dalam penelitian ini,

peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan proses Implementasi Keputusan Lurah Mangkubumen Nomor 148.16/689.1 Tahun 2018 Tentang Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben) Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta melalui Program Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen dengan menggunakan teori tahapan implementasi keputusan kebijakan menurut Teori Van Meter dan Van Horn. Implementasi Kebijakan Publik di pengaruhi oleh 5 variabel menurut Teori Van Meter dan Van Horn : a) Standar dan ukuran kebijakan, b) Sumber daya, c) Karakteristik agen pelaksana, d) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, e) Lingkungan ekonomi, social, politik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada informan, serta data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive*. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Mangkubumen (2018-

2020), Lurah Mangkubumen yang menjabat sekarang, Ketua dan Pengurus Mpok Sinah Klamben serta anggota Mpok Sinah Klamben (2018-2024) serta RT/RW setempat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data atau sumber, sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisa data Model Interaktif dari Miles and Huberman (1994), yang terdiri dari *data reduction*, *data display* dan *conclusions drawing/verifying*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian berdasarkan proses penyajian, analisis, dan interpretasi data yang didapatkan setelah melakukan penelitian di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta melalui wawancara dan studi dokumentasi disertai dengan deskripsi untuk mempermudah dalam melakukan proses analisis hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Keputusan Lurah Mangkubumen Nomor



148.16/689.1 tentang Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan faktor-faktor yang menjelaskan peran Pemerintah Kelurahan dalam Implementasi Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen.

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Implementasi Keputusan Lurah Mangkubumen Nomor 148.16/689.1 Tahun 2018 Tentang Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben) Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Kota Surakarta, penulis dapat menganalisis bahwa implementasi Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen dapat menjadi contoh baik bagi Kelurahan di dalam Kota Surakarta maupun di tingkat nasional dapat memberikan contoh bagi UMKM di seluruh Indonesia karena jarang sekali Kantor Kelurahan terdapat UMKM di sertai live musik, dapat ditinjau beberapa hal yaitu :

#### 1. Standar Dan Ukuran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan, yaitu standar dan sasaran yang hendak dicapai oleh kebijakan atau program. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus secara spesifik dijabarkan sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program. Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya

menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketepatan standar dan sasaran tersebut. Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketepatan standar dan sasaran tersebut.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangkubumen yaitu adalah Keputusan Lurah Mangkubumen Nomor 148.16/689.1 tentang Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen. Dalam peraturan tersebut diatur tentang hak dan kewajiban lurah untuk melayani masyarakat salah satunya membentuk dan melindungi pelaku usaha Mpok Sinah Klamben.

Berdasarkan hasil observasi penulis terkait standar dan ukuran kebijakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Mpok Sinah Klamben adalah capaian standar keberhasilan serta tujuan dari terbentuknya Mpok Sinah Klamben dapat berhasil. Dan Hasil dari wawancara dari berbagai pihak yakni membuktikan bahwa dari aspek Standar dan ukuran

kebijakan dapat dikatakan berhasil karena pelaku Mpok Sinah Klamben merasa terbantu dalam mengurus perizinan untuk usaha mereka.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya, yaitu melihat pada dua hal. Pertama pada sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan alat yang digunakan dalam menentukan keberhasilan kebijakan dalam pemberdayaan. Sumber daya baik dari sumber daya manusia sumber daya finansial ataupun sumber daya waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) bahwa : “sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan”. Namun dalam proses implementasi kebijakan fokus kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Kelurahan Mangkubumen melakukan berbagai upaya yang dilakukan guna dapat mengimplementasikan program pemberdayaan Mpok Sinah Klamben. Salah satunya melalui pelatihan ataupun sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkuat pemahaman dalam

membangun usaha yang lebih baik.

Berdasarkan observasi penulis terkait sumber daya terkait dengan pemberdayaan Mpok Sinah Klamben bagi masyarakat di Kelurahan Mangkubumen mengacu kepada ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan modal. Misalnya saja dalam sumber daya manusia program pemberdayaan Mpok Sinah Klamben, dari segi kualitas pegawai Kelurahan Mangkubumen memiliki kualitas yang baik namun dari segi kuantitas masih kurang dan tetap harus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini sedang menghadapi persaingan global. Karena bila melihat jumlah luas wilayah Kelurahan Mangkubumen, jumlah Mpok Sinah Klamben yang begitu sedikit, sekitar 15 pelaku usaha masih belum mencukupi jumlah yang diharapkan Kelurahan Mangkubumen untuk membuka peluang penambahan jumlah pelaku usaha Mpok Sinah Klamben. Sehingga harus ada penambahan atau kerjasama dengan pihak Dinas Koperasi UMK dan Perindustrian Kota Surakarta dalam hal pemberdayaan Mpok Sinah Klamben.

## 3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana, yaitu merujuk pada ciri-ciri atau budaya yang berkembang pada organisasi tersebut. Implementasi kebijakan agar mencapai

keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengel betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.”

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait karakteristik agen pelaksana dalam rangka pemberdayaan pelaku Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen dapat dilihat dari proses kerjasama, disiplin dan tanggung jawab para agen pelaksana sehingga proses implementasi kebijakan terkait pemberdayaan Mpok Sinah Klamben terbilang berhasil. Struktur birokrasi yang

bekerja sesuai dengan standar operasional pelayanan menyempurnakan proses implementasi kebijakan.

#### 4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, yaitu merujuk pada mekanisme prosedur yang direncanakan untuk membahas program yang dilaksanakan. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses penciptaan dan saling menemukan pesan dalam satu hubungan jaringan tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Dengan demikian, prospek kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency) (Van Horn dan Van Meter dalam Widodo, 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi

kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam memberdayakan para pelaku Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen. Kelurahan Mangkubumen bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian menjalankan beberapa strategi beberapa diantaranya dengan menyiapkan aparatur yang bertanggung jawab disetiap bidang yang ada serta dengan memberikan beberapa pelatihan kepada para pelaku Mpok Sinah Klamben. Selanjutnya Kelurahan Mangkubumen juga menjadi jembatan bagi para pelaku usaha dalam membangun komunikasi antar pelaku usaha Mpok Sinah Klamben.

#### 5. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yaitu merujuk lingkungan dari ranah implementasi mampu mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan atau program itu sendiri. Variabel ini mencakup lingkungan social pelaksanaan Mpok Sinah Klamben, sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana

sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terkait pengaruh ekonomi, lingkungan sosial dan politik dalam pemberdayaan pelaku Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut. Sektor lingkungan sosial kegiatan usaha disuatu wilayah harus sejalan dengan norma dan adat istiadat masyarakat setempat. Selanjutnya pada sektor ekonomi lebih kepada meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan bagi daerah dan dari segi politik menekankan pada produk sebuah kebijakan harus sejalan dengan upaya pemberdayaan bagi pelaku Mpok Sinah Klamben.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Implementasi Kebijakan Kelompok Usaha Kecil, Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Jeratan Rentenir di Kelurahan Mangkubumen maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar dan Ukuran Kebijakan adalah dengan tercapainya standar keberhasilan dan tujuan pembentukan Mpok Sinah

- Klamben dapat tercapai atau berhasil sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Lurah Mangkubumen.
2. Sumber Daya adalah ketersediaan sumber daya manusia dan sumberdaya modal dan sumberdaya waktu. Menanamkan pengetahuan kepada para pelaku usaha Mpok Sinah Klamben tentang bagaimana menjalankan usaha dengan baik membuat masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha yang dimiliki. Selanjutnya ketersediaan modal merupakan penopang sehingga pengembangan usaha bagi para pelaku Mpok Sinah Klamben dapat berjalan dengan baik..
  3. Karakteristik Agen Pelaksana adalah Para aparatur Kelurahan, Lembaga, masyarakat serta pelaku Mpok Sinah Klamben disiplin dan tanggung jawab para agen pelaksana sehingga proses implementasi kebijakan terkait pemberdayaan Mpok Sinah Klamben terbilang berhasil. Struktur birokrasi yang bekerja sesuai dengan standar operasional pelayanan menyempurnakan proses implementasi kebijakan.
  4. Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana, Dinas Koperasi UMK dan Perindustrian Kota Surakarta, Kelurahan Mangkubumen, Lembaga masyarakat serta pelaku Mpok Sinah

- Klamben menjalankan tugas dan fungsinya serta beberapa strategi beberapa diantaranya dengan menyiapkan aparatur yang bertanggung jawab dan kompeten di setiap bidang yang ada serta dengan memberikan beberapa pelatihan kepada para pelaku Mpok Sinah Klamben. Selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta juga menjadi jembatan bagi para pelaku usaha dalam membangun komunikasi pada kegiatan usaha pelaku Mpok Sinah Klamben.
5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah Sektor lingkungan sosial kegiatan usaha di suatu wilayah harus sejalan dengan adat istiadat masyarakat serta lingkungan sekitar dalam menjalankan usaha Mpok Sinah Klamben. Selanjutnya pada sektor ekonomi lebih kepada meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan bagi daerah dan dari segi politik menekankan pada produk sebuah kebijakan harus sejalan dengan upaya pemberdayaan bagi para pelaku Mpok Sinah Klamben.

## **REFERENSI**

### **Buku :**

- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

Purwanto, Erwan Agus dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.

Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta.

Budiarto, Rachmawan, et all (2016). *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Naditya dkk (2013:1088). Dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Jones (Mulyadi, 2015:45). Those Activities directed toward putting a program into effect.

Lister (Taufik dan Isril, 2013:136). Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Widodo (Syahida, 2014:10). Implementasi

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

### **Perundang-undangan :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

### **Internet :**

Isnanto, Bayu Ardi. (2019, Agustus 16). Mengulas 3 Program yang Jadikan Mangkubumen Kelurahan Terbaik Se-Indonesia. Detik.com.

Pemerintah Kota Surakarta. (2019, Agustus 21). Terima Kasih Mpok Sinah Klamben dan Mangku Lawren.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/daya>.

Kementerian Keuangan. (2012). Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program

Kredit Usaha Rakyat (KUR).  
Diakses melalui  
[https://www.kemenkeu.go.id/site/s/d/default/files/laporan\\_tim\\_kajian\\_kebijakan\\_antisipasi\\_krisis\\_tahun\\_2012\\_melalui\\_kur.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/site/s/d/default/files/laporan_tim_kajian_kebijakan_antisipasi_krisis_tahun_2012_melalui_kur.pdf).

### **Jurnal Ilmiah :**

- Dass, Mahaganapathy, et all. (2019). Community Empowerment through the My kasih Entrepreneurship Program towards Urban Poverty Alleviation in Kuala Lumpur, Malaysia. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 7 (5).
- Ismail, Fitri, et all. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha Kecil (Studi Kasus : Perajin Emping Melinjo oleh PT. Telekomunikasi, tbk di Desa Narimbang, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang). *Jurnal Adbispreneur*, 1(2).
- Kusumawardhani, et all (2015). The Role of Government in MSMEs : The Empowerment of MSMEs During the Free Trade Era in Indonesia.
- Wahyuni (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul.
- Safriansyah, et all (2019). Strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM, Polewali. *Strategies for Improving the Competitive Advantages of SMES in the Era of Regional Autonomy*.